

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara terbesar berasal dari sektor pajak yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan Negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah untuk pembangunan Negara di segala bidang. Penerimaan dari sektor pajak dibagi menjadi dua golongan, pertama Pajak Langsung contohnya Pajak Penghasilan (PPh), kedua Pajak Tidak Langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak penghasilan hanya akan dikenakan kepada Wajib Pajak Pribadi atau Badan yang penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Namun, hal tersebut tidak berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena PPN dikenakan kepada setiap orang yang telah menggunakan barang atau jasa dimana barang atau jasa tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 yang berlaku sejak tanggal 1 April 1985, sebagai pengganti Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951. Lalu terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 yang berlaku sejak tanggal 1 April 2010 sampai saat ini yang mengatur tentang pengenaan PPN dan PPnBM. Peraturan perpajakan terus mengalami perubahan sebagai upaya Pemerintah untuk memenuhi target pendapatan dari sektor pajak yang digunakan salah satunya untuk membangun infrastruktur Negara. Terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai

tanggal 1 Juli 2015 Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) hal ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang maupun jasa di dalam daerah pabean atau dalam Negeri yang dibebankan pada masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean, namun mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan dilakukan pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. PPN mempunyai karakteristik *multi stage tax* yaitu PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan menyerahkan barang yang tergolong Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak pertambahan nilai terdiri dari dua komponen yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menyerahkan atau menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diproduksinya.

Sebagai bukti pemungutan baik PPN Keluaran maupun PPN Masukan akan diterbitkan faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkan menggunakan aplikasi elektronik e-Faktur yang berlaku sejak 1 Juli 2015. Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang berlaku saat ini sebesar 10%, sedangkan tarif 0% atas ekspor barang. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan pengenaan PPN, tetapi pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Penjual akan menerbitkan faktur penjualan dan mencantumkan PPN

Keluaran pada faktur pajak. Sebaliknya pada saat melakukan pembelian bahan atau barang, akan dipungut pajak oleh penjual maka bagi pembeli dianggap sebagai PPN Masukan yang akan dicantumkan pada faktur pembelian. Jumlah PPN yang harus disetor setiap bulan diperoleh dari selisih PPN Keluaran dan PPN Masukan, maka PPN terhutang harus disetorkan seorang pengusaha kena pajak (PKP) pada kas Negara.

Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan Akuntansi karena “Akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut” (Waluyo, 2014:34). Jika kaitannya dengan PPN, Akuntansi harus menghasilkan informasi ekonomi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akuntansi pajak bukan hanya proses penghitungan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya.

UD. Airmas Surabaya merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual sabun detergen, sabun colek, dan sabun cair dengan merek Airmas. Ditinjau dari kegiatan usahanya UD. Airmas melakukan kegiatan usaha yang dikenakan PPN. Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang terjadi di dalam perusahaan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, UD. Airmas mempunyai kewajiban perpajakan yaitu membayar dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas

transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi di perusahaan. UD. Airmas wajib melaksanakan pembukuan atau pencatatan atas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang ada pada perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di UD. Airmas Surabaya”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Adapun tujuan dari studi lapang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di UD. Airmas Surabaya dan apakah sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembukuan atau pencatatan Akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di UD. Airmas Surabaya dan apakah sudah sesuai dengan PSAK.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Adapun manfaat dari studi lapang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Mengetahui dan memahami praktek kerja yang sesungguhnya, sehingga bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas teori-teori yang diperoleh selama di bangku kuliah.

2. Bagi Stiesia

Sebagai bentuk penerapan teori-teori yang diperoleh mahasiswa dalam praktek dunia kerja yang sesungguhnya.

3. Bagi UD. Airmas Surabaya

Mendapatkan masukan terkait penerapan Akuntansi PPN yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan yang ada di UD. Airmas Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup adalah pembahasan atas suatu masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi kesimpangsiuran serta pembahasan yang terlalu luas dalam memecahkan permasalahan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah UD. Airmas Surabaya. Pembahasan difokuskan atas transaksi penjualan yang dikenakan pajak keluaran, transaksi pembelian yang dikenakan pajak masukan serta PPN yang dibayar perusahaan dan pencatatan Akuntansi PPN apakah sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PSAK.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Nazir (dalam Whitney, 1960:160) menyatakan bahwa “Metode deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena tertentu”. Sumber data diperoleh dari studi lapang di UD. Airmas Surabaya. Sumber data primer berasal dari data E-Faktur Pajak keluaran, Pajak masukan, Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (E-SPT Masa PPN) Masa April 2016, rekap Penjualan, rekap Pembelian dan data-data pendukung lain yang diperlukan. Sumber data sekunder diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku yang memuat teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan Laporan Tugas Akhir ini.

Data yang telah diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder akan dilakukan analisis data secara deskriptif dimana data tidak diubah dalam perhitungan angka statistik, melainkan “Untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki” (Nazir, 2013:43). Lalu akan ditarik kesimpulan secara kualitatif atas data-data yang sudah diteliti. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan yaitu:

1. Observasi

Cara pengambilan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara teliti dan sistematis. Pengamatan dilakukan pada saat input Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang diproses pada aplikasi perpajakan E-Faktur sampai menghasilkan SPT PPN Masa April 2016 yang siap dilaporkan pada KPP dimana UD.Airmas teraftar sebagai PKP. Observasi juga dilakukan pada saat proses pencatatan Akuntansi pada aplikasi GLK baik Akuntansi Pajak Keluaran, Pajak Masukan dan PPN yang dibayarkan.

2. Wawancara

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau

pewawancara dengan si penjawab atau responden. Penulis melakukan wawancara dan bertanya pada Direktur UD. Airmas yang bertujuan mendapatkan informasi atas fakta-fakta, keadaan yang sebenarnya terjadi terkait pembahasan pada Laporan Tugas Akhir ini. Pertanyaan-pertanyaan yang penulis tanyakan seperti tentang struktur organisasi, sejarah perusahaan, bagaimana proses transaksi penjualan pembelian yang menimbulkan PPN yang dipungut, disetorkan, dan dilaporkan pada KPP terdaftar, pertanyaan tentang seperti apa pencatatan atau pembukuan Akuntansi atas PPN Keluaran, PPN Masukan dan PPN Kurang Bayar dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat untuk pembahasan Laporan Tugas Akhir ini.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencatat dan mempelajari sumber data berupa tulisan, dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian disebut dokumentasi. Dokumentasi yang diperoleh dari UD. Airmas Surabaya diantaranya yaitu: Data penjualan harian atau per-tanggal, rekap penjualan, faktur pajak masukan dari supplier, faktur pajak keluaran yang dibuat dari aplikasi E-Faktur, Formulir Induk SPT PPN Masa September 2017 dan data maupun dokumen lain yang diperlukan sebagai bukti transaksi yang terjadi di UD. Airmas Surabaya. Dokumentasi bertujuan untuk membuktikan suatu transaksi tersebut memang ada atau benar-benar terjadi dengan melakukan penelusuran atas data yang tertulis baik dari dokumen, buku-buku, laporan harian, rekapan transaksi dan dari data tertulis lainnya.